

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru. Pada era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Keadaan negara saat ini sangat memprihatinkan hal ini disebabkan oleh kurang adanya pemerintahan yang baik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bukan saja sistemnya yang belum tertata rapi tetapi krisis multidimensi yang dihadapi oleh negara saat ini (Audyta, 2013)

Waliyati dalam Riantiarno 2011 mengatakan pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang luar batas biasa (*extra ordinary*) untuk memperbaiki keadaan, sehingga diperlukan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah yang tidak biasa. Jangan sampai timbul kesan tidak baik untuk para pejabat pemerintah, dan melanggar undang-undang dan haluan negara. Yang terpenting tetap bertahan mempertanggung jawabkan kinerjanya sampai akhir masa jabatan. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan dan kinerja yang dihasilkan.

Pemerintah dalam pengelolaannya harus memperlihatkan transparansi dan melakukan akuntabilitas publik dalam kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan

perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Pusdiklatwas BPKP, 2011)

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2004) yang mengatakan bahwa wujud dari penganggaran otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim dan Kusufi, 2014). Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran.

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharono dan Solichin, 2006). Adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan sebuah

organisasi dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif dan adil merata dapat terwujud apabila dilakukan pengendalian manajemen yang baik. Salah satu jenis dalam pengendalian intern manajemen adalah pengendalian akuntansi. Menurut Moven (2012) pengendalian akuntansi suatu organisasi adalah untuk menjamin langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas dari aktivitas-aktivitas organisasi. Pengendalian akuntansi merupakan sistem yang menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan sengaja.

Laporan keuangan sektor publik berperan penting dalam komponen menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi yang berupa laporan keuangan. Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggung jawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk menilai kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam suatu organisasi pemerintah memerlukan pengendalian intern tanpa terkecuali. Pengendalian mengukur pelaksanaan kerja ataupun prestasi dengan membandingkan rencana dan tujuan. Meskipun perencanaan dilakukan terlebih dahulu, tetapi tidak akan berhasil dengan sendirinya tanpa bantuan dari pengendalian tersebut. Menurut Mulyadi (2010) sistem pengendalian intern

meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Suatu pengendalian yang efektif, dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi ataupun perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian intern diharapkan semua telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik.

Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintah juga menerapkan prinsip *Good Governance* dengan tujuan penataan pemerintahan yang lebih baik, dan menjadi negara yang lebih baik pula. Melaksanakan *Good Governance* yang baik tentu kinerja suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa jika pelaksanaan *Good Governance* ditingkatkan maka dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. *Good Governance* adalah pengelolaan pemerintah yang baik, pemerintah dituntut agar dapat mengelola daerahnya dengan baik, memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki demi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2009).

Wardani (2008) menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* salah satu prinsipnya yaitu akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja perusahaan, baik sektor publik, maupun swasta. Hal tersebut menyatakan bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas dalam sektor publik guna meningkatkan kinerja ataupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2014) yang mengungkapkan tentang bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern, dan

motivasi kinerja pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Dengan sampel 14 Instansi Pemerintah di Kota Jambi menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel Daerah Kota Jambi, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Kabupaten Kendal.

Pemerintah Kabupaten Kendal dipilih sebagai penelitian dengan pertimbangan bahwa beberapa indikator kinerja pada pemerintah Kabupaten Kendal belum terlaksana setiap tahun. Hal ini dijelaskan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kendal tahun 2013 bahwa dalam melaksanakan kegiatan kinerja tersebut ada beberapa kelemahan, kendala atau hambatan yang dialami seperti kualitas SDM yang masih lemah disebabkan oleh pengalaman kerja yang minim, dan dukungan anggaran yang tidak memadai sehingga beberapa indikator kinerja utama tidak bisa berjalan setiap tahun. Hasil rekapitulasi keuangan triwulan I anggaran 2017 dari 55 OPD hanya ada 3 OPD yang berhasil lampui target yaitu bagian umum, bagian organisasi, dan kesbangpol (www.kendalkab.go.id).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini tidak menggunakan variabel motivasi tetapi dengan variabel *Good Governance*, tujuan penggunaan variabel *Good Governance* ini karena *Good Governance* dapat dijadikan sebagai faktor baru dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Governance* tersebut terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Determinan Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kejelasan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kendal?
2. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kendal?
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kendal?
4. Apakah Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kendal?
5. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kendal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Kejelasan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kendal.
2. Untuk menguji pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kendal.

3. Untuk menguji pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kendal.
4. Untuk menguji pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Kendal.
5. Untuk menguji pengaruh pemahaman prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kendal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Kendal penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan masukan dan memberikan refrensi dalam meningkatkan kinerjanya.
2. Bagi peneliti dapat menambah pemahaman materi tentang kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern dan *good governance*.
3. Bagi pembaca dan peneliti lain dapat menambah wawasan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penelitian ini juga dapat memberikan tambahan informasi dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk mengetahui tingkat pengaruh akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat menggunakan penelitian ini sebagai alat untuk

memaksimalkan kinerja di instansi pemerintah di Kabupaten/Kota masing-masing pembaca.